

Implementasi Strategi Smart Power Dalam Operasi Wilayah Konflik di Papua

Hermandus Cahyo Nugroho¹ Suradi AS² Sugiri³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: hermanduscahyo@gmail.com¹ suradi.as@idu.ac.id² sugiri@idu.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas konflik di Papua yang bersifat multidimensional, mencakup aspek keamanan, sosial, budaya, sejarah, dan psikologis masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pendekatan yang tidak hanya mengandalkan hard power, tetapi juga memadukannya dengan soft power melalui komunikasi sosial, pembinaan teritorial, pelayanan masyarakat, dan pembangunan kepercayaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi strategi Smart Power dalam operasi wilayah konflik di Papua, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta merumuskan strategi penguatan yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari unsur TNI, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat, serta didukung oleh studi dokumentasi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Smart Power telah dilaksanakan melalui kombinasi operasi pengamanan, pembinaan teritorial, komunikasi sosial, dan pendekatan humanis kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, belum meratanya pemahaman personel terhadap konteks sosial budaya Papua, resistensi dan ketidakpercayaan masyarakat, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta fragmentasi struktur birokrasi. Penguatan implementasi diarahkan pada integrasi perencanaan hard power dan soft power, peningkatan kapasitas personel, penguatan koordinasi antara satuan operasi dan satuan kewilayahan, penyusunan mekanisme kerja bersama, serta kesinambungan program nonmilitar. Penelitian menyimpulkan bahwa strategi Smart Power relevan diterapkan dalam operasi wilayah konflik di Papua, tetapi efektivitasnya bergantung pada konsistensi pelaksanaan, ketepatan pemilihan instrumen, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan dukungan sumber daya yang memadai.

Kata Kunci: Implementasi, Smart Power, Strategi, Stabilitas dan Keamanan, Papua

Abstract

This study is motivated by the multidimensional complexity of the conflict in Papua, which encompasses security, social, cultural, historical, and psychological aspects of society. These conditions require an approach that does not rely solely on hard power, but also integrates soft power through social communication, territorial development, public services, and trust-building. This study aims to analyze the implementation of the Smart Power strategy in operations in conflict-affected areas of Papua, identify the inhibiting factors, and formulate effective strengthening strategies. The study employs a qualitative research method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews with key informants from the Indonesian National Armed Forces (TNI), local government, and community leaders, and were supported by document analysis and relevant literature. The findings indicate that Smart Power has been implemented through a combination of security operations, territorial development, social communication, and a humanistic approach toward local communities. However, its implementation has not yet been fully optimal due to limited resources and infrastructure, uneven personnel understanding of Papua's sociocultural context, community resistance and distrust, weak cross-sectoral coordination, and bureaucratic fragmentation. Strengthening efforts are directed toward integrating hard-power and soft-power planning, improving personnel capacity, enhancing coordination between operational and territorial units, establishing joint working mechanisms, and ensuring the continuity of non-military programs. The study concludes that the Smart Power strategy is relevant for application in operations in conflict-affected areas of Papua, but its effectiveness depends on consistent implementation, the appropriate selection of instruments, coordination among stakeholders, and adequate resource support.

Keywords: Implementation, Smart Power, Strategy, Stability and Security, Papua



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Papua merupakan wilayah yang memiliki arti strategis bagi Indonesia, baik dari aspek geopolitik, geostrategi, maupun geokultural. Posisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, kekayaan sumber daya alam, serta keragaman sosial dan budaya menjadikan Papua penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, dinamika keamanan di Papua masih menghadapi berbagai tantangan. Gangguan keamanan bersenjata, konflik sosial-politik, terhambatnya pelayanan pemerintahan, serta terganggunya aktivitas pembangunan masih terjadi di sejumlah kabupaten dan distrik tertentu. Kondisi tersebut tidak berlangsung secara merata di seluruh Papua. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan istilah wilayah konflik di Papua untuk merujuk pada wilayah tertentu yang mengalami kekerasan bersenjata, ancaman terhadap masyarakat dan aparat, gangguan pelayanan pemerintahan, serta hambatan terhadap aktivitas sosial dan pembangunan. Konflik di Papua merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga berhubungan dengan sejarah politik, pembangunan, identitas, sosial budaya, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Aktivitas kelompok bersenjata di beberapa wilayah telah menimbulkan korban, menghambat aktivitas masyarakat, membatasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta mengganggu pelaksanaan pembangunan. Menurut Wiratama (2024), eskalasi aktivitas kelompok bersenjata menunjukkan bahwa penanganan konflik di Papua memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pengendalian ancaman, tetapi juga mempertimbangkan akar sosial, budaya, dan psikologis yang melatarbelakangnya.

Dinamika konflik tersebut tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah Papua. Proses integrasi Papua ke dalam Indonesia, kebijakan keamanan pada masa sebelumnya, keterbatasan ruang dialog, persoalan pembangunan, serta berbagai pengalaman kekerasan telah membentuk ingatan kolektif pada sebagian kelompok masyarakat. Pengalaman tersebut memengaruhi cara sebagian masyarakat pada wilayah konflik dalam memandang kehadiran negara dan aparat keamanan. Dengan demikian, ketidakpercayaan yang masih ditemukan di sejumlah wilayah tidak hanya berkaitan dengan peristiwa yang sedang berlangsung, tetapi juga merupakan akumulasi dari pengalaman sosial dan politik pada masa lalu. Faktor sejarah tersebut berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kebijakan pada masa sekarang. Pengalaman konflik dan kekerasan dapat membentuk trauma serta ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan kemudian memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kehadiran aparat dan program pemerintah. Rendahnya penerimaan masyarakat selanjutnya dapat menghambat komunikasi sosial, pembinaan teritorial, serta pelaksanaan program kesejahteraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan konflik di Papua tidak cukup dilakukan melalui pendekatan keamanan semata, tetapi memerlukan strategi yang mampu membangun rasa aman sekaligus kepercayaan masyarakat.

Sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan Otonomi Khusus Papua sejak 2001. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas kewenangan daerah, meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki pelayanan publik, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi kepentingan Orang Asli Papua. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain tata kelola, akuntabilitas, ketimpangan pembangunan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi. Hidayat dan Arafat (2022:37) menunjukkan adanya kritik dari kelompok masyarakat tertentu terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus. Temuan tersebut tidak dapat dipandang

sebagai pendapat seluruh masyarakat Papua, tetapi menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dan penerimaan masyarakat pada wilayah tertentu. Perkembangan ancaman dan kompleksitas persoalan di Papua mendorong perubahan dalam pendekatan keamanan. Pada masa lalu, penanganan konflik lebih banyak dipersepsikan menonjolkan pengendalian wilayah dan penanganan ancaman bersenjata. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjaga kedaulatan, melindungi masyarakat, mengamankan objek strategis, dan memastikan keberlangsungan pemerintahan. Meskipun kegiatan pembinaan teritorial dan pelayanan masyarakat telah dilaksanakan, hubungan antara tindakan keamanan dan kegiatan sosial belum selalu direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam satu kerangka yang terintegrasi.

Pendekatan yang berkembang pada masa sekarang tidak menghilangkan penggunaan kekuatan. *Hard power* tetap diperlukan untuk menghadapi ancaman bersenjata, melindungi masyarakat, mengamankan objek vital, serta menciptakan ruang yang aman bagi berlangsungnya pelayanan pemerintahan. Namun, penggunaannya diarahkan agar lebih selektif, terukur, proporsional, dan disesuaikan dengan tingkat ancaman. Pada saat yang sama, pendekatan tersebut dipadukan dengan *soft power* melalui komunikasi sosial, pembinaan teritorial, pelayanan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dasar, serta pendekatan kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Penggabungan kedua pendekatan tersebut dikenal sebagai strategi *Smart Power*. Dalam penelitian ini, *Smart Power* tidak dipahami sekadar sebagai penjumlahan antara *hard power* dan *soft power*, tetapi sebagai kemampuan memilih, mengombinasikan, mengurutkan, dan mengoordinasikan kedua instrumen tersebut sesuai dengan karakter ancaman, kondisi masyarakat, wilayah, waktu, serta tujuan operasi. Unsur “smart” terletak pada ketepatan pemilihan instrumen, proporsionalitas penggunaannya, pembagian peran antarpelaksana, serta kesinambungan antara tahap pencegahan, penanganan ancaman, dan pemulihan kondisi masyarakat.

Gagasan penerapan *Smart Power* dalam penanganan konflik Papua memperoleh penegasan publik melalui arahan pimpinan TNI pada periode 2023–2024. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menekankan pentingnya mengutamakan pendekatan lunak dan teritorial, sedangkan penggunaan kekuatan bersenjata ditempatkan sesuai dengan tingkat ancaman dan kebutuhan operasi (Media Indonesia, 2024). Pernyataan tersebut menunjukkan arah pendekatan operasional TNI dalam penanganan konflik Papua. Namun demikian, periode tersebut lebih tepat dipahami sebagai penguatan dan penegasan terminologi *Smart Power*, bukan sebagai awal munculnya seluruh unsur pendekatan tersebut. Pembinaan teritorial, komunikasi sosial, Bakti TNI, dan pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan jauh sebelumnya sebagai bagian dari tugas kewilayahan TNI. Meskipun demikian, implementasi strategi *Smart Power* dalam operasi wilayah konflik di Papua belum sepenuhnya optimal. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan masih adanya hambatan struktural dan teknis. Priesdiantoro (2024) mengidentifikasi lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana, serta belum meratanya kemampuan personel dalam memahami budaya lokal. Hambatan tersebut dapat memengaruhi konsistensi pelaksanaan program, hubungan antara satuan operasi dan satuan kewilayahan, serta keberlanjutan kegiatan setelah terjadi penggantian personel atau satuan.

Berdasarkan uraian tersebut, masalah utama dalam penelitian ini bukan terletak pada ketiadaan tindakan keamanan atau kegiatan sosial. Kedua instrumen tersebut telah dilaksanakan oleh berbagai satuan dan lembaga. Permasalahan utamanya terletak pada belum optimalnya proses pemilihan, penggabungan, pengurutan, koordinasi, dan evaluasi antara *hard power* dan *soft power* dalam satu kerangka *Smart Power*. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh

belum meratanya pemahaman pelaksana, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarsatuan dan lintas sektor, perbedaan kondisi sosial budaya, pengaruh pengalaman sejarah, fragmentasi kewenangan, serta belum seragamnya indikator keberhasilan. Penelitian terdahulu telah membahas konflik Papua, operasi keamanan, pembinaan teritorial, pembangunan, Otonomi Khusus, serta pendekatan sosial. Namun, sebagian besar penelitian masih menempatkan pendekatan keamanan dan pembangunan sebagai bidang yang terpisah. Kajian yang secara khusus menganalisis mekanisme integrasi antara satuan pelaksana *hard power*, satuan kewilayahan, pemerintah daerah, Polri, dan masyarakat dalam kerangka implementasi *Smart Power* masih terbatas.

Kesenjangan penelitian tersebut terlihat pada belum terjelaskannya bagaimana bentuk operasional *Smart Power* diterapkan di wilayah konflik, bagaimana koordinasi antara satuan operasi dan satuan kewilayahan berlangsung, faktor apa yang menghambat implementasinya, serta strategi penguatan apa yang dapat diterapkan berdasarkan tujuan, cara, dan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis terhadap implementasi *Smart Power*, faktor-faktor penghambatnya, serta strategi penguatan yang diperlukan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan tiga sudut pandang secara terintegrasi. Pertama, konsep *Smart Power* digunakan untuk menilai ketepatan penggabungan *hard power* dan *soft power*. Kedua, teori implementasi kebijakan George C. Edward III digunakan untuk menganalisis komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Ketiga, kerangka ends-ways-means digunakan untuk merumuskan strategi penguatan. Penelitian ini juga memberikan perhatian khusus pada koordinasi antara satuan operasi dan satuan kewilayahan sebagai unsur penting dalam pelaksanaan *Smart Power* di wilayah konflik.

Untuk memperjelas permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi Strategi *Smart Power* dalam Operasi Wilayah Konflik di Papua saat ini?. Berdasarkan rumusan masalah utama tersebut, pertanyaan penelitian yang lebih spesifik dikembangkan sebagai berikut: Bagaimana implementasi strategi *Smart Power* oleh TNI dalam operasi wilayah Konflik di Papua? Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi strategi *Smart Power* dalam operasi wilayah konflik di Papua? Bagaimana strategi penguatan implementasi *Smart Power* yang efektif dalam mendukung stabilitas dan keamanan berkelanjutan di wilayah konflik Papua? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi strategi *Smart Power* dalam operasi pengamanan di daerah rawan Papua. Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan strategi tersebut di lapangan serta kesenjangan yang terjadi antara konsep ideal dan praktik aktual. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Menganalisis implementasi strategi *Smart Power* oleh TNI dalam operasi wilayah Konflik di Papua. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi strategi *Smart Power* dalam operasi wilayah konflik di Papua. Menganalisis strategi penguatan implementasi *Smart Power* yang efektif dalam mendukung stabilitas dan keamanan berkelanjutan di wilayah konflik Papua.

Hasil Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Ridha Iswardhana & Puguh Toko Arisanto (2022). "Implementasi *Smart Power* dan Linkage Issues Indonesia dalam Perlindungan Kedaulatan Maritim di Kepulauan Natuna." Penelitian ini mengkaji bagaimana strategi *Smart Power* diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan kedaulatan di wilayah Kepulauan Natuna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara *hard power* (militer dan keamanan maritim) serta *soft power* (diplomasi dan kerja sama internasional) menjadi kunci dalam menghadapi klaim sepihak Tiongkok. Persamaan penelitian ini dengan tesis yang

akan dilakukan terletak pada penggunaan pendekatan *Smart Power* sebagai kerangka strategi nasional. Namun, perbedaannya adalah pada ruang lingkup dan fokus isu—penelitian ini menitikberatkan pada sengketa maritim di Natuna, sedangkan tesis ini fokus pada operasi pengamanan wilayah darat rawan di Papua. Kontribusi penting dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman bahwa *Smart Power* mampu meningkatkan posisi tawar Indonesia melalui kombinasi diplomatik dan kekuatan nasional (Iswardhana, 2022).

2. Putra Yudha Wijaya Mukti dkk (2024). "Implementasi Program Pertahanan dalam Mendorong Percepatan Pembangunan di Wilayah Provinsi Papua." Penelitian ini menganalisis peran program pertahanan dalam mendorong pembangunan di Papua. Temuan utama menunjukkan bahwa program pertahanan tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga secara signifikan membantu pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti peran strategis TNI dalam konteks Papua. Perbedaannya terletak pada pendekatan konseptual, di mana tesis ini menggunakan teori *Smart Power* sebagai lensa utama analisis, sementara penelitian terdahulu lebih menekankan pada sinergi program pembangunan. Kontribusinya memperkuat argumen bahwa peran pertahanan dapat diluaskan menjadi fungsi pembangunan multidimensi.
3. Fransisco dkk (2023). "Strategi TNI dalam Menanggulangi Gerakan Separatis Papua guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Kesejahteraan Papua." Penelitian ini menelaah pendekatan TNI dalam menghadapi gerakan separatis bersenjata di Papua, yang sebagian besar masih berorientasi pada operasi tempur dan kegiatan militer bersifat *hard power*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pendekatan represif dapat menurunkan intensitas serangan bersenjata dalam jangka pendek, strategi tersebut tidak menyelesaikan akar permasalahan seperti ketidakadilan sosial, marginalisasi ekonomi, dan konflik budaya. Selain itu, citra militer sering menjadi tantangan tersendiri karena kurangnya pendekatan humanis kepada masyarakat. Persamaannya dengan tesis ini adalah sama-sama berfokus pada konteks konflik Papua dan melibatkan peran langsung TNI sebagai aktor utama. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya perubahan strategi dalam operasi pengamanan daerah rawan konflik. Namun perbedaannya cukup signifikan. Penelitian Fransisco masih mengandalkan perspektif *hard power*, tanpa memasukkan dimensi *soft power* seperti diplomasi, pembangunan, dan komunikasi budaya. Sedangkan tesis ini secara spesifik menawarkan konsep strategis alternatif yaitu *Smart Power* sebagai solusi integratif dan jangka panjang. Kontribusi penelitian ini sangat berharga sebagai kritik atas pendekatan konvensional yang selama ini diterapkan. Hal ini memperkuat urgensi tesis dalam mengusulkan pendekatan strategis yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kompleksitas sosial di Papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh mengenai penerapan strategi *Smart Power* dalam konteks operasi pengamanan di daerah rawan konflik Papua. Pendekatan ini dianggap paling sesuai karena memungkinkan peneliti memahami dinamika sosial, politik, dan keamanan yang terjadi secara alami di lapangan. Pendekatan kualitatif menekankan pada eksplorasi makna di balik fenomena sosial, dengan mengandalkan peneliti sebagai instrumen utama, data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara induktif (Creswell, 2014). Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus (*case study*), di mana Papua menjadi fokus utama sebagai wilayah dengan karakteristik konflik yang kompleks. Studi kasus memungkinkan peneliti menggali informasi dari berbagai sudut pandang dan aktor kunci,

seperti anggota TNI, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam operasi di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman holistik mengenai implementasi strategi *Smart Power*, termasuk bagaimana perpaduan antara *hard power* (seperti operasi militer) dan *soft power* (seperti pendekatan budaya dan komunikasi) diterapkan untuk membangun stabilitas jangka panjang. Pendekatan ini juga memungkinkan pengungkapan faktor-faktor penghambat dan pendorong keberhasilan strategi tersebut dari perspektif aktor lokal. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Papua. Data dan bahan referensi diambil dari beberapa sumber data yang valid dan terukur untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian. Adapun lokasi dari penelitian dapat diartikan sebagai setting atau konteks sebuah penelitian, tidak mesti mengacu kepada wilayah namun juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2019). Penelitian ini diawali pada bulan Mei s.d Oktober 2025.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara. Wawancara merupakan teknik utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam dari narasumber. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan dengan para pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan strategi keamanan di Papua, antara lain personel TNI, pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta pengamat keamanan.
2. Observasi. Teknik observasi dilakukan untuk melengkapi data hasil wawancara dengan mengamati langsung dinamika di lapangan atau melalui dokumentasi visual yang tersedia. Observasi dilakukan baik secara langsung (mengamati kegiatan pengamanan atau kegiatan sosial terkait) maupun tidak langsung (melalui media visual, dokumentasi lembaga, atau liputan media). Observasi dalam penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana strategi *Smart Power* diterapkan secara nyata baik dalam bentuk kegiatan militer non-tempur, pembangunan infrastruktur sosial, maupun komunikasi budaya dengan masyarakat lokal. Teknik ini membantu peneliti untuk menangkap konteks sosial, pola interaksi antar aktor, serta indikasi keberhasilan atau kegagalan dari strategi yang dijalankan.
3. Studi Pustaka. Studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan menelusuri berbagai dokumen tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, laporan kebijakan, buku, dokumen strategi militer, berita terpercaya, hingga dokumen resmi pemerintah terkait konflik dan kebijakan pertahanan di Papua. Penelitian ini juga mengkaji teori-teori penting seperti teori *Smart Power*, ketahanan nasional, dan manajemen konflik, sebagai dasar konseptual. Studi pustaka berperan penting dalam membangun landasan teori dan kerangka berpikir penelitian ini. Selain itu, studi kepustakaan juga digunakan untuk membandingkan hasil wawancara dan observasi, serta sebagai sumber sekunder dalam proses triangulasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Strategi *Smart Power* oleh TNI dalam Operasi wilayah Konflik di Papua

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, implementasi strategi *Smart Power* dalam operasi wilayah konflik di Papua dipahami sebagai pola pengelolaan keamanan yang menggabungkan tindakan pengamanan dengan pendekatan sosial dan teritorial. Para informan memiliki pandangan yang relatif sama bahwa konflik di Papua tidak hanya bersifat bersenjata, tetapi juga berkaitan dengan sejarah konflik, kondisi sosial budaya, ketimpangan pembangunan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, tindakan pengamanan tidak dapat dilaksanakan secara terpisah dari pembinaan teritorial, komunikasi sosial, pelayanan masyarakat, dan pembangunan kepercayaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa *Smart Power* tidak dipahami hanya sebagai penggunaan *hard power* dan *soft power* secara bersamaan, tetapi sebagai penyesuaian bentuk tindakan terhadap tingkat

ancaman dan kondisi masyarakat. Pada wilayah dengan eskalasi keamanan rendah, pendekatan teritorial, dialog, dan komunikasi sosial lebih diutamakan. Sebaliknya, pada wilayah yang menghadapi ancaman bersenjata aktif, unsur kekuatan tetap disiapkan dan digunakan secara terbatas untuk menjamin keamanan masyarakat, personel, dan kegiatan pemerintahan. Pola tersebut menunjukkan bahwa pilihan pendekatan ditentukan oleh situasi lapangan dan tidak diterapkan secara seragam pada setiap wilayah.

Dari sisi perencanaan operasi, Pabandyaops Sopsdam XVII/Cenderawasih menjelaskan bahwa integrasi *hard power* dan *soft power* telah diperhitungkan sejak tahap analisis situasi dan penyusunan pola operasi. Unsur tempur diarahkan untuk menjamin keamanan dan memberikan daya cegah terhadap ancaman, sedangkan unsur intelijen melakukan deteksi dini dan pemetaan perkembangan situasi. Pada saat yang sama, unsur teritorial menjalankan komunikasi sosial dan pendekatan kepada masyarakat. Pembagian tersebut dimaksudkan agar operasi tidak hanya menghasilkan keberhasilan pengamanan secara taktis, tetapi juga mencegah timbulnya dampak sosial yang dapat memperpanjang konflik. Pabandyaops Sopsdam XVII/Cenderawasih menegaskan bahwa *hard power* digunakan secara selektif terhadap ancaman bersenjata yang nyata, sedangkan *soft power* dilaksanakan secara berkelanjutan sebelum, selama, dan setelah kegiatan pengamanan. Ketika terjadi peningkatan gangguan keamanan, unsur pengamanan tetap disiagakan. Namun, satuan teritorial tetap membangun komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan kedua fungsi tersebut secara bersamaan bertujuan agar tindakan pengamanan tidak dipersepsikan semata-mata sebagai tindakan represif, tetapi juga sebagai upaya menjaga kehidupan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan pemerintahan.

Pada tingkat kewilayahan, Dandim menjelaskan bahwa pendekatan teritorial menjadi ujung tombak implementasi Smart Power. Babinsa diarahkan untuk mengenal masyarakat secara personal, memahami adat dan kebiasaan setempat, serta membangun komunikasi secara berkesinambungan. Kehadiran Babinsa tidak hanya berkaitan dengan pemantauan wilayah, tetapi juga sebagai penghubung antara masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah daerah. Melalui hubungan tersebut, berbagai persoalan lokal dapat diketahui lebih awal dan tidak seluruhnya berkembang menjadi gangguan keamanan. Pendekatan *soft power* diwujudkan melalui pendampingan pembangunan kampung, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dukungan pendidikan, ketahanan pangan, kegiatan keagamaan, serta keterlibatan dalam aktivitas masyarakat. Kasrem dan Dandim menyatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan wilayah dan, pada pelaksanaannya, melibatkan pemerintah daerah maupun instansi lain. Kegiatan sosial tersebut tidak menggantikan fungsi pemerintah daerah, tetapi membantu menjangkau masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan pelayanan. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa koordinasi merupakan unsur utama dalam pelaksanaan Smart Power. Unsur pengamanan berperan menjaga situasi, mencegah gangguan, dan memberikan perlindungan terhadap kegiatan masyarakat maupun program pemerintah. Sementara itu, Satgas Teritorial dan komando kewilayahan menjalankan pembinaan wilayah, komunikasi sosial, serta pendekatan kepada tokoh lokal. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi karena kegiatan sosial membutuhkan jaminan keamanan, sedangkan kondisi aman perlu dipertahankan melalui hubungan yang baik dengan masyarakat. Koordinasi dilaksanakan sejak tahap perencanaan melalui pembagian peran antara unsur tempur, intelijen, dan teritorial. Unsur pengamanan menyampaikan informasi mengenai tingkat ancaman, lokasi rawan, dan kebutuhan pengamanan. Sebaliknya, satuan kewilayahan memberikan informasi mengenai kondisi sosial masyarakat, struktur adat, tokoh berpengaruh, serta potensi penolakan atau konflik lokal. Informasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan waktu, lokasi, dan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pada tahap pelaksanaan, unsur pengamanan mendukung keamanan kegiatan pembinaan teritorial, pelayanan masyarakat, dan pembangunan. Satuan kewilayahan kemudian menjalankan komunikasi dengan warga agar kegiatan pengamanan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dandim memberikan contoh bahwa setelah kegiatan pengamanan di wilayah rawan, Babinsa tetap melaksanakan komunikasi sosial dengan masyarakat setempat. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga hubungan dengan warga dan mencegah munculnya kesan intimidatif akibat kehadiran pasukan. Koordinasi tidak hanya berlangsung di lingkungan TNI. Unsur Kesbangpol menjelaskan bahwa TNI dan pemerintah daerah berkoordinasi melalui rapat keamanan dan ketertiban serta komunikasi informal di tingkat daerah. Forum tersebut digunakan untuk menyelaraskan kegiatan keamanan, program sosial, dan pelayanan publik agar tidak terjadi tumpang tindih. Pemerintah daerah juga dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan agar pelaksanaan pendekatan keamanan tetap sejalan dengan kebutuhan daerah. Tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat turut berperan dalam koordinasi tersebut. Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat, dialog umumnya dilakukan secara bertahap dan informal agar warga lebih nyaman menyampaikan aspirasi. Keterlibatan tokoh lokal membantu mengurangi kesalahpahaman dan menjembatani komunikasi antara aparat dengan masyarakat. Dari perspektif masyarakat, penggunaan kekuatan masih dianggap diperlukan untuk menghadapi kelompok bersenjata, tetapi lebih dapat diterima apabila diimbangi dengan komunikasi, kegiatan sosial, dan penghormatan terhadap masyarakat. Meskipun koordinasi telah berjalan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum selalu seragam. Kondisi geografis, perubahan situasi keamanan, keterbatasan personel dan logistik, serta intensitas komunikasi antarinstansi memengaruhi keberlanjutan kegiatan. Kasiops menyatakan bahwa ketika situasi keamanan berubah cepat, kegiatan sosial terkadang harus disesuaikan atau ditunda. Kesbangpol juga menjelaskan bahwa koordinasi yang lemah dapat menyebabkan program sosial terhenti atau tidak tepat sasaran.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang telah berlangsung masih memerlukan pola kerja yang lebih konsisten. Koordinasi tidak cukup hanya dilakukan ketika terjadi peningkatan gangguan keamanan, tetapi perlu dipertahankan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Kesenambungan koordinasi juga penting untuk mencegah terputusnya hubungan dengan masyarakat ketika terjadi pergantian personel, perubahan satuan, atau perubahan prioritas kegiatan. Dari perspektif tokoh masyarakat, pola pendekatan TNI saat ini dinilai lebih komunikatif dibandingkan masa sebelumnya. Masyarakat mulai melihat bahwa kehadiran aparat tidak hanya berkaitan dengan operasi bersenjata, tetapi juga dengan kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kehadiran Babinsa, dukungan pelayanan kesehatan, bantuan sosial, serta keterlibatan dalam kegiatan keagamaan dan adat dinilai membantu mengurangi rasa takut dan membuka ruang komunikasi. Namun, penerimaan tersebut belum merata karena sebagian masyarakat masih dipengaruhi oleh pengalaman konflik masa lalu dan rasa curiga terhadap aparat.

Unsur Kesbangpol juga menilai bahwa pendekatan yang menggabungkan keamanan dan kegiatan sosial memberikan ruang yang lebih baik bagi pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Situasi yang lebih kondusif memungkinkan pemerintah daerah menjangkau masyarakat pada wilayah yang sulit diakses. Selain itu, keterlibatan TNI sebagai fasilitator komunikasi membantu membuka dialog antara masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah daerah. Meskipun demikian, hasil wawancara tidak menunjukkan bahwa Smart Power telah menyelesaikan seluruh persoalan konflik. Para informan menyatakan bahwa gangguan bersenjata masih terjadi, sementara trauma sosial, ketimpangan pembangunan, isu hak asasi manusia, dan keterbatasan pelayanan masih memengaruhi hubungan masyarakat dengan aparat. Karena itu, keberhasilan pendekatan ini lebih terlihat pada kemampuannya

menjaga situasi agar tidak mudah berkembang menjadi konflik yang lebih luas, meningkatkan komunikasi, dan menciptakan ruang bagi kegiatan sosial serta pembangunan. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, implementasi strategi Smart Power dalam operasi wilayah konflik di Papua telah berlangsung melalui tiga pola utama. Pertama, penggunaan kekuatan secara terukur sesuai tingkat ancaman. Kedua, pelaksanaan pembinaan teritorial dan kegiatan sosial secara berkelanjutan. Ketiga, koordinasi antara unsur pengamanan, satuan teritorial, komando kewilayahan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Hambatan utamanya terlihat pada belum seragamnya koordinasi, keterbatasan sumber daya dan akses, perubahan situasi keamanan, serta belum meratanya kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan Smart Power telah menunjukkan perubahan pendekatan yang lebih adaptif, tetapi keberhasilannya masih bergantung pada konsistensi koordinasi, kesinambungan kegiatan teritorial, dan kemampuan seluruh pelaksana menyesuaikan tindakan dengan karakter wilayah dan masyarakat.

Faktor-faktor Penghambat Implementasi Strategi *Smart Power* dalam Operasi wilayah Konflik di Papua

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Pabandyaops Sopsdam XVII/Cenderawasih, Dandim 1710/Mimika, Danyonif TP 815/WGT, unsur Kesbangpol Pemkab Keerom, serta tokoh masyarakat, implementasi strategi Smart Power dalam operasi wilayah konflik di Papua masih menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat internal, operasional, sosial budaya, dan lintas sektor. Hambatan-hambatan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan memengaruhi konsistensi penggunaan hard power dan soft power di lapangan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek utama, yaitu: (a) kendala internal kelembagaan dan kapasitas personel; (b) kendala operasional dan keterbatasan sumber daya; (c) kendala sosial, budaya, dan psikologis masyarakat; serta (d) kendala koordinasi lintas sektor dan keberlanjutan program nonmilitar.

Strategi Penguatan Implementasi *Smart Power* agar Lebih Efektif dalam Menjaga Stabilitas Keamanan di Papua

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan kunci yang terlibat langsung dalam pelaksanaan operasi wilayah Konflik di Papua, serta hasil telaah terhadap dokumen operasi dan referensi pendukung, diperoleh gambaran bahwa implementasi strategi *Smart Power* oleh TNI telah berjalan dan mengalami perkembangan secara bertahap. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan strategi *Smart Power* masih diperlukan agar penerapannya lebih konsisten, terintegrasi, dan mampu menjawab dinamika keamanan Papua yang kompleks dan berjangka panjang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan memiliki pemahaman yang relatif sama mengenai pentingnya pendekatan *Smart Power* sebagai strategi utama dalam pengamanan Papua. Pendekatan ini dipahami sebagai kombinasi antara kekuatan militer yang terukur dengan pendekatan sosial, komunikasi, dan pembinaan masyarakat. Namun, temuan lapangan juga menunjukkan bahwa tingkat implementasi *Smart Power* belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah dan satuan, sehingga diperlukan upaya penguatan agar pendekatan tersebut dapat berjalan secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pabandyaops Sopsdam XVII/Cenderawasih dan Danyonif TP 815/WGT, penguatan implementasi *Smart Power* dipandang perlu dimulai dari aspek perencanaan dan pengendalian operasi. Dalam praktiknya, pendekatan *Smart Power* telah diintegrasikan dalam rencana operasi pengamanan, namun dalam beberapa kondisi

masih ditemukan dominasi pendekatan keamanan fisik, terutama ketika terjadi peningkatan gangguan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara *hard power* dan *soft power* masih bersifat situasional dan sangat dipengaruhi oleh dinamika ancaman di lapangan. Pabandyaops Sopsdam XVII/Cenderawasih menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan operasi, satuan di lapangan dituntut untuk mampu menyesuaikan pendekatan dengan kondisi wilayah dan karakter masyarakat setempat. Pendekatan lunak melalui komunikasi sosial, pembinaan teritorial, dan dialog dengan tokoh masyarakat telah dilaksanakan, namun intensitas dan kedalamannya sangat bergantung pada kemampuan personel dan dukungan situasi keamanan. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi *Smart Power* telah diterapkan, tetapi masih membutuhkan penguatan dari sisi konsistensi dan kesinambungan.

Dari hasil wawancara dengan Dandim 1710/Mimika, diperoleh gambaran bahwa penguatan strategi *Smart Power* juga berkaitan erat dengan kapasitas dan pemahaman personel di tingkat pelaksana. Dandim menjelaskan bahwa prajurit di lapangan telah berupaya menerapkan pendekatan humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat, terutama melalui peran Babinsa. Namun demikian, perbedaan latar belakang budaya, keterbatasan waktu penugasan, serta tingginya dinamika keamanan menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pendekatan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa satuan teritorial memiliki peran sentral dalam implementasi *Smart Power*. Babinsa menjadi ujung tombak dalam membangun komunikasi, kepercayaan, dan hubungan sosial dengan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan komunikasi sosial, pendampingan masyarakat, serta keterlibatan dalam kegiatan adat dan keagamaan terbukti mampu meredam ketegangan dan memperbaiki persepsi sebagian masyarakat terhadap aparat keamanan. Namun demikian, efektivitas peran ini masih sangat bergantung pada dukungan struktural dan kesinambungan pembinaan. Hasil wawancara dengan Kesbangpol Pemkab Keerom menunjukkan bahwa penguatan implementasi *Smart Power* juga sangat dipengaruhi oleh sinergi lintas sektor. Dalam praktiknya, pendekatan keamanan yang dilakukan oleh TNI belum selalu diikuti secara optimal oleh program pembangunan sosial dan ekonomi dari pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan hasil pendekatan *soft power* yang telah dibangun oleh aparat keamanan tidak selalu berlanjut dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga dampaknya terhadap stabilitas jangka panjang menjadi terbatas.

Selain itu, hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat cenderung merespons positif pendekatan yang bersifat dialogis dan humanis. Namun, mereka juga menilai bahwa pendekatan tersebut perlu dilakukan secara konsisten dan tidak bersifat sementara. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan *Smart Power* sangat bergantung pada keberlanjutan interaksi dan keterlibatan aparat dengan masyarakat, bukan hanya pada intensitas kehadiran militer. Dari keseluruhan temuan lapangan, dapat dianalisis bahwa strategi penguatan implementasi *Smart Power* dalam operasi wilayah Konflik di Papua mencakup beberapa aspek utama, yaitu penguatan integrasi pendekatan *hard power* dan *soft power* dalam perencanaan operasi, peningkatan kapasitas personel dalam pendekatan sosial dan budaya, optimalisasi peran satuan teritorial, serta peningkatan sinergi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Aspek-aspek tersebut telah mulai diterapkan, namun masih memerlukan penguatan agar mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap stabilitas keamanan. Dengan demikian, hasil analisis data menunjukkan bahwa strategi *Smart Power* telah menjadi kerangka utama dalam operasi pengamanan Papua, tetapi implementasinya masih bersifat adaptif dan belum sepenuhnya terlembaga secara kuat. Penguatan strategi *Smart Power* diperlukan agar pendekatan keamanan yang dilakukan oleh TNI tidak hanya mampu menekan gangguan keamanan dalam jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas keamanan yang lebih berkelanjutan.

Pembahasan

Implementasi Strategi *Smart Power* dalam Operasi Wilayah Konflik di Papua

Implementasi strategi *Smart Power* dalam operasi wilayah konflik di Papua merupakan bentuk kebijakan keamanan yang dirancang untuk merespons konflik yang bersifat kompleks dan multidimensional. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan ancaman bersenjata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, psikologis, dan sejarah hubungan antara negara dan sebagian masyarakat di wilayah konflik Papua. Berbeda dengan pendekatan keamanan yang hanya menitikberatkan pada penggunaan kekuatan militer, strategi *Smart Power* mengintegrasikan *hard power* dan *soft power* secara proporsional dan kontekstual. *Hard power* digunakan secara terukur untuk menghadapi ancaman bersenjata, melindungi masyarakat, dan menjamin keamanan wilayah. Sementara itu, *soft power* dilaksanakan melalui pembinaan teritorial, komunikasi sosial, dialog, pelayanan masyarakat, dan pembangunan kepercayaan. Pembahasan implementasi strategi *Smart Power* dalam penelitian ini mencakup penerapan *hard power* dan *soft power*, pembagian peran antarsatuan, mekanisme koordinasi antara Satgas pengamanan dan satuan teritorial, serta keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian, implementasi tidak hanya dinilai dari keberadaan kedua pendekatan tersebut, tetapi juga dari kemampuan pelaksana dalam memilih, mengintegrasikan, dan mengoordinasikannya sesuai dengan kondisi wilayah. Dalam kerangka kebijakan publik, penerapan strategi *Smart Power* dapat dipahami sebagai proses menerjemahkan arahan dan tujuan kebijakan keamanan ke dalam tindakan operasional. Stabilitas keamanan tidak hanya diukur melalui penurunan gangguan bersenjata, tetapi juga melalui meningkatnya rasa aman, terbukanya ruang dialog, meningkatnya penerimaan masyarakat, dan berlangsungnya pelayanan publik. Pembahasan ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan untuk membahas kesesuaian antara kebijakan, pelaksanaan di lapangan, serta hasil wawancara dengan Pabandyaops Sopsdam XVII/Cenderawasih, Dandim 1710/Mimika, Danyonif TP 815/WGT, unsur Kesbangpol Pemkab Keerom, dan tokoh masyarakat.

Faktor-faktor Penghambat Implementasi Strategi *Smart Power* dalam Operasi wilayah Konflik di Papua

Pembahasan ini menguraikan faktor-faktor yang menghambat implementasi strategi *Smart Power* dalam operasi wilayah konflik di Papua serta keterkaitan antarhambatan dalam pelaksanaan pendekatan yang mengintegrasikan *hard power* dan *soft power*. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Strategi *Smart Power* menuntut keselarasan antara arah kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini tidak dapat berjalan secara optimal apabila hanya menguatkan aspek keamanan fisik tanpa disertai pendekatan sosial yang konsisten, kapasitas personel yang memadai, dan dukungan lintas sektor yang berkelanjutan. Dalam konteks Papua, pelaksanaannya menjadi lebih kompleks karena dipengaruhi oleh dinamika ancaman, kondisi geografis, keragaman sosial budaya, pengalaman konflik masa lalu, dan tingkat kepercayaan masyarakat.

Kendala Komunikasi Kebijakan *Smart Power*

Dalam teori Edward III, komunikasi menentukan apakah kebijakan dapat diterima, dipahami, dan dilaksanakan secara tepat. Komunikasi kebijakan meliputi dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Kebijakan dapat mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya

apabila informasi tidak tersampaikan kepada seluruh pelaksana, substansinya tidak dipahami secara jelas, atau arah kebijakannya tidak dilaksanakan secara konsisten. Dalam implementasi strategi Smart Power, hasil penelitian menunjukkan bahwa arah kebijakan telah disampaikan melalui jalur komando, perintah operasi, pengarahan sebelum pelaksanaan tugas, dan evaluasi kegiatan. Penggunaan kekuatan diarahkan secara proporsional sesuai tingkat ancaman, sedangkan pendekatan sosial dan teritorial tetap dilaksanakan untuk menjaga hubungan dengan masyarakat. Pada dimensi transmisi, hambatan tidak hanya terjadi dalam penyampaian informasi secara vertikal dari komando atas kepada satuan pelaksana, tetapi juga secara horizontal antara unsur operasi, intelijen, Satgas pengamanan, satuan teritorial, Kodim, Koramil, dan Babinsa. Setiap unsur memiliki informasi yang berbeda. Unsur pengamanan memahami perkembangan ancaman, sedangkan satuan kewilayahan memiliki informasi mengenai kondisi sosial, tokoh lokal, dan kebutuhan masyarakat. Apabila pertukaran informasi tersebut terlambat atau tidak lengkap, penentuan bentuk pendekatan dapat menjadi kurang tepat. Keterbatasan jaringan komunikasi, medan yang sulit, dan luasnya wilayah turut memengaruhi transmisi informasi. Arahan yang sama dapat diterima pada waktu yang berbeda atau diterjemahkan secara berlainan oleh satuan pelaksana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan variasi dalam menentukan proporsi antara hard power dan soft power.

Kendala Sumber Daya dan Dukungan Operasional

Menurut Edward III, ketersediaan sumber daya menentukan kemampuan pelaksana menjalankan kebijakan. Sumber daya mencakup personel, kompetensi, anggaran, peralatan, informasi, dan kewenangan. Arahan kebijakan yang telah dikomunikasikan dengan baik tidak akan menghasilkan pelaksanaan yang optimal apabila sumber daya yang tersedia tidak mencukupi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas wilayah, medan yang sulit, dan sebaran masyarakat yang terpencar memerlukan dukungan personel dan logistik yang besar. Namun, jumlah personel, terutama aparat teritorial, belum selalu sebanding dengan luas wilayah binaan. Kondisi tersebut menyebabkan intensitas interaksi dengan masyarakat belum dapat berlangsung secara merata. Dari aspek sumber daya manusia, hambatan tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel, tetapi juga kesesuaian kompetensi. Strategi Smart Power memerlukan kemampuan operasional sekaligus kemampuan komunikasi sosial, pemetaan sosial, mediasi konflik, dan pemahaman budaya lokal. Ketidakseimbangan antara kemampuan taktis dan kemampuan sosial dapat memengaruhi kualitas pendekatan kepada masyarakat. Keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi juga memengaruhi mobilitas, pertukaran informasi, dan jangkauan kegiatan. Pelayanan kesehatan, pendampingan pendidikan, bantuan sosial, dan ketahanan pangan tidak selalu dapat dilaksanakan secara rutin di wilayah yang sulit dijangkau. Akibatnya, kegiatan soft power berpotensi berlangsung secara episodik, padahal kepercayaan masyarakat membutuhkan kehadiran yang konsisten. Dari sisi anggaran, program sosial memerlukan dukungan yang berkelanjutan. Apabila kegiatan hanya dilakukan dalam jangka pendek dan tidak diikuti oleh program lanjutan, manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi terbatas. Hal tersebut dapat menimbulkan penilaian bahwa pendekatan sosial hanya bersifat sementara.

Kendala Disposisi Pelaksana dan Keseragaman Paradigma

Disposisi dalam teori Edward III mencakup sikap, pemahaman, komitmen, dan kemauan pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan dengan baik dapat mengalami penyimpangan apabila pelaksana tidak memiliki pemahaman dan orientasi yang sama dengan tujuan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen personel untuk menerapkan pendekatan yang humanis relatif kuat. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya komunikasi sosial, pembinaan teritorial, pelayanan masyarakat, dan upaya membedakan

masyarakat sipil dari kelompok bersenjata. Namun, terdapat perbedaan dalam memahami ukuran keberhasilan operasi. Sebagian pelaksana lebih mudah menilai keberhasilan melalui indikator hard power, seperti berkurangnya gangguan bersenjata dan terkendalinya wilayah. Sementara itu, keberhasilan soft power dinilai melalui tumbuhnya kepercayaan, meningkatnya keterbukaan masyarakat, dan berkurangnya resistensi sosial. Perbedaan orientasi tersebut dapat menghasilkan pilihan tindakan yang berbeda. Pelaksana yang lebih berorientasi pada hasil taktis cenderung mengutamakan pengamanan jangka pendek, sedangkan pelaksana yang memahami dimensi sosial akan mempertimbangkan dampak tindakan terhadap hubungan jangka panjang dengan masyarakat. Kendala disposisi juga berkaitan dengan kemampuan personel menyesuaikan diri terhadap budaya lokal. Personel yang memiliki pengalaman sosial dan pemahaman adat lebih mudah membangun komunikasi dibandingkan personel yang baru bertugas. Karena itu, pergantian personel dapat memengaruhi kesinambungan hubungan sosial. Rotasi personel tidak hanya memindahkan tugas pengamanan, tetapi juga berpotensi memutus pengetahuan informal mengenai tokoh lokal, pola komunikasi, dan program yang sedang berjalan. Apabila serah terima hanya menekankan kondisi keamanan tanpa mencakup informasi sosial, personel baru harus membangun kembali hubungan dari tahap awal.

Kendala Struktur Birokrasi, Koordinasi Lintas Sektor, dan Keberlanjutan Program

Menurut Edward III, struktur birokrasi memengaruhi implementasi melalui SOP, pembagian kewenangan, hubungan antarunit, dan fragmentasi tanggung jawab. Struktur yang jelas dapat mendukung pengendalian, tetapi struktur yang terlalu sektoral atau kaku dapat menghambat koordinasi dan penyesuaian terhadap kondisi lapangan. Dalam implementasi strategi Smart Power, struktur komando TNI memberikan kejelasan pengendalian dan tanggung jawab. Namun, pelaksanaan strategi melibatkan banyak unsur, yaitu satuan operasi, intelijen, Satgas pengamanan, Satgas Teritorial, Kodim, Koramil, Babinsa, Polri, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Banyaknya aktor tersebut menimbulkan risiko fragmentasi apabila tidak disertai pembagian peran dan mekanisme koordinasi yang jelas. Secara operasional, Satgas pengamanan menjalankan fungsi perlindungan dan pengendalian ancaman, sedangkan Satgas Teritorial serta komando kewilayahan melaksanakan pembinaan masyarakat dan komunikasi sosial. Pemerintah daerah menjalankan pelayanan publik dan program pembangunan, sedangkan tokoh lokal menjadi penghubung antara aparat dan masyarakat. Pembagian fungsi tersebut telah terbentuk, tetapi efektivitasnya bergantung pada koordinasi yang berlangsung sebelum, selama, dan setelah kegiatan. Sebelum kegiatan, unsur pengamanan dan teritorial perlu menyamakan informasi mengenai ancaman, kondisi sosial, tokoh yang perlu dilibatkan, dan kebutuhan masyarakat. Selama kegiatan, unsur pengamanan memberikan perlindungan, sedangkan satuan teritorial menjalankan komunikasi sosial. Setelah kegiatan, Kodim, Koramil, dan Babinsa perlu melanjutkan pembinaan agar kondisi aman tidak berhenti sebagai hasil sementara.

Strategi penguatan implementasi *Smart Power* agar lebih efektif dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua

Dalam merumuskan strategi penguatan implementasi *Smart Power* oleh TNI dalam operasi wilayah Konflik di Papua, penelitian ini menggunakan pendekatan teori strategi Arthur F. Lykke Jr. Teori ini menjelaskan bahwa strategi yang efektif harus mencakup tiga unsur utama, yaitu Ends (tujuan strategis), Ways (cara atau pendekatan untuk mencapainya), dan Means (sumber daya yang digunakan). Hubungan antara ketiga unsur tersebut membentuk keseimbangan yang menentukan keberhasilan strategi dalam jangka panjang. Apabila salah satu unsur tidak seimbang, maka strategi berpotensi menghasilkan capaian yang bersifat sementara, tidak merata, atau sulit dipertahankan. Pendekatan *Ends–Ways–Means* relevan

digunakan dalam konteks operasi pengamanan Papua karena strategi *Smart Power* tidak hanya berorientasi pada penanganan gangguan keamanan bersenjata, tetapi juga menuntut pembangunan stabilitas sosial melalui penguatan kepercayaan masyarakat, pembinaan teritorial, komunikasi sosial, serta sinergi lintas sektor untuk mendukung kesejahteraan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Smart Power* sudah berjalan dan menunjukkan perkembangan, namun masih menghadapi kendala konsistensi, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya dukungan lintas sektor. Oleh karena itu, strategi penguatan diperlukan agar *Smart Power* tidak berhenti sebagai kebijakan normatif, tetapi menjadi pola operasi yang terlembaga, terukur, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi sebelumnya, strategi penguatan implementasi *Smart Power* di Papua dipahami sebagai upaya menegaskan tujuan strategis (*Ends*) yang jelas, merumuskan cara atau pendekatan (*Ways*) yang tepat dan adaptif, serta memastikan ketersediaan sumber daya (*Means*) yang memadai sehingga keseimbangan strategi dapat terjaga dalam menghadapi dinamika keamanan Papua yang kompleks.

KESIMPULAN

Implementasi Strategi *Smart Power* dalam Operasi Wilayah Konflik di Papua secara umum telah berjalan dan menunjukkan arah perubahan paradigma pengamanan yang lebih adaptif dan humanis, namun belum sepenuhnya optimal dan merata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TNI telah mulai mengintegrasikan pendekatan *hard power* dan *soft power* dalam pelaksanaan operasi wilayah Konflik di Papua, khususnya melalui pelaksanaan Operasi Teritorial, peran Babinsa, kegiatan komunikasi sosial, serta keterlibatan dalam pembangunan sosial dan kemasyarakatan. Pendekatan ini mencerminkan upaya nyata TNI untuk tidak lagi mengandalkan kekuatan militer semata, melainkan membangun stabilitas keamanan melalui penguatan kepercayaan masyarakat dan pendekatan berbasis kultural. Namun demikian, implementasi *Smart Power* masih bersifat adaptif dan situasional, sangat dipengaruhi oleh dinamika ancaman keamanan di lapangan. Pada kondisi tertentu, terutama ketika terjadi eskalasi gangguan keamanan bersenjata, pendekatan *hard power* masih cenderung lebih dominan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara dimensi keras dan lunak belum sepenuhnya terlembagakan secara konsisten di seluruh satuan dan wilayah operasi. Dengan demikian, implementasi *Smart Power* telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan dari sisi konsistensi, kesinambungan, dan pelembagaan strategi.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi *Smart Power* di Papua bersifat multidimensional, meliputi kendala internal kelembagaan, keterbatasan sumber daya, serta hambatan sosial dan lintas sektor. Secara internal, hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sosial-budaya, luasnya wilayah operasi, serta kondisi geografis Papua yang sulit menjadi kendala utama dalam menjangkau seluruh wilayah secara intensif dan berkelanjutan. Selain itu, belum optimalnya sistem komunikasi terpadu dan keterbatasan dukungan logistik untuk kegiatan *soft power* menyebabkan pendekatan sosial sering kali tidak dapat dilakukan secara kontinu. Dari sisi eksternal, hambatan muncul dalam bentuk resistensi sebagian masyarakat yang masih menyimpan trauma historis terhadap pendekatan keamanan masa lalu, serta perbedaan latar belakang budaya yang belum sepenuhnya dipahami oleh aparat. Lemahnya sinergi lintas sektor antara TNI, pemerintah daerah, dan instansi sipil juga menjadi faktor penghambat signifikan. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya memperkuat hasil pendekatan *soft power* belum selalu berjalan selaras, sehingga dampak stabilisasi jangka panjang menjadi terbatas. Hambatan-hambatan tersebut tidak meniadakan keberhasilan strategi *Smart Power*, namun menjadi tantangan struktural yang perlu diatasi secara komprehensif.

Strategi penguatan implementasi *Smart Power* agar lebih efektif dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua dapat dirumuskan melalui pendekatan strategi Ends–Ways–Means sebagaimana dikemukakan oleh Arthur F. Lykke Jr. Dari aspek Ends, tujuan strategis penguatan *Smart Power* adalah terwujudnya stabilitas keamanan yang berkelanjutan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara, serta menurunnya eskalasi konflik bersenjata di Papua. Tujuan ini tidak hanya berorientasi pada keamanan fisik, tetapi juga pada keamanan sosial dan psikologis masyarakat. Dari aspek Ways, strategi penguatan ditempuh melalui integrasi pendekatan operasional terpadu, penguatan pendekatan sosial-humanis berbasis budaya lokal, optimalisasi peran satuan teritorial sebagai ujung tombak *Smart Power*, serta pelembagaan kerja sama lintas sektor dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa stabilitas keamanan tidak dapat dicapai hanya melalui kekuatan senjata, tetapi melalui kolaborasi dan partisipasi sosial yang berkelanjutan. Sementara itu, dari aspek Means, diperlukan dukungan sumber daya yang memadai, meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas personel, dukungan anggaran yang proporsional untuk kegiatan *soft power*, penguatan sarana komunikasi dan mobilitas, serta regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi *Smart Power* secara konsisten. Keseimbangan antara ketiga unsur tersebut menjadi kunci agar strategi *Smart Power* tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi stabilitas keamanan Papua.

Saran

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *Smart Power* relevan digunakan dalam kajian strategi pertahanan, khususnya pada operasi pengamanan di wilayah rawan konflik seperti Papua. *Smart Power* tidak hanya dapat dipahami sebagai perpaduan antara *hard power* dan *soft power*, tetapi juga sebagai pendekatan strategis yang menuntut keseimbangan antara tindakan pengamanan, pembinaan teritorial, komunikasi sosial, pembangunan kepercayaan masyarakat, dan sinergi lintas sektor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori *Smart Power* dalam konteks pertahanan darat. Selama ini konsep *Smart Power* lebih banyak digunakan dalam kajian hubungan internasional dan diplomasi, sedangkan dalam penelitian ini *Smart Power* ditempatkan sebagai pendekatan operasional dalam pengamanan wilayah rawan konflik. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kajian akademik mengenai *Smart Power* sebagai strategi pengamanan yang mengintegrasikan kekuatan militer, pendekatan sosial budaya, dan dukungan pembangunan wilayah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan, khususnya melalui penggunaan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks Papua, keberhasilan implementasi *Smart Power* tidak hanya ditentukan oleh kejelasan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam memahami kondisi sosial budaya masyarakat, ketersediaan sumber daya, serta efektivitas koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, teori implementasi kebijakan perlu dikembangkan secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan karakter wilayah konflik, kondisi geografis, serta dinamika sosial masyarakat lokal. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian *Smart Power* dengan pendekatan kuantitatif atau campuran. Penelitian lanjutan dapat mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan, efektivitas komunikasi sosial, keberhasilan pembinaan teritorial, serta dampak program *soft power* terhadap stabilitas keamanan. Dengan demikian, hasil kajian *Smart Power* tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga dapat menghasilkan indikator pengukuran yang lebih objektif dan aplikatif.

Saran Praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Smart Power* dalam operasi pengamanan daerah rawan Papua perlu terus diperkuat agar tidak hanya berorientasi pada penurunan gangguan keamanan, tetapi juga mampu membangun kepercayaan

masyarakat, memperkuat stabilitas sosial, dan mendukung keberlanjutan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan beberapa saran praktis sebagai berikut:

1. Kepada Panglima TNI; Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional *Smart Power* sebagai doktrin operasional pengamanan wilayah rawan konflik, khususnya di Papua, yang mengintegrasikan secara jelas penggunaan *hard power* dan *soft power* dalam satu kerangka operasi terpadu. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa pendekatan lunak tidak bersifat situasional, tetapi menjadi bagian yang terlembaga dalam setiap tahap operasi pengamanan. Mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus *Smart Power* dalam operasi pengamanan wilayah, yang mengatur mekanisme pengambilan keputusan antara pendekatan militer dan pendekatan sosial, termasuk indikator keberhasilan yang tidak hanya berbasis penurunan gangguan keamanan, tetapi juga peningkatan kepercayaan dan penerimaan masyarakat.
2. Kepada Kasad; Memperkuat peran satuan teritorial sebagai ujung tombak implementasi *Smart Power*, dengan menempatkan pembinaan teritorial, komunikasi sosial, dan pendampingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam operasi wilayah Konflik di Papua. Mengintegrasikan materi *Smart Power* dan operasi militer selain perang (OMSP) secara lebih mendalam dalam kurikulum pendidikan dan pembinaan personel Angkatan Darat, sehingga paradigma pengamanan berbasis pendekatan komprehensif dapat dipahami sejak awal pembentukan prajurit.
3. Kepada Pangdam XVII/Cenderawasih dan Korem Jajaran; Memperkuat perencanaan dan pengendalian operasi pengamanan berbasis *Smart Power*, dengan memastikan keseimbangan antara kegiatan pengamanan fisik dan kegiatan pembinaan sosial masyarakat dalam setiap rencana operasi. Mendorong inovasi pendekatan teritorial yang berbasis kearifan lokal, dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis dalam membangun komunikasi, dialog, dan penyelesaian masalah secara damai.
4. Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota Terkait; Meningkatkan sinergi dengan TNI dalam mendukung implementasi *Smart Power*, khususnya melalui penyelarasan program pembangunan daerah dengan kegiatan pembinaan teritorial dan pendekatan sosial yang dilakukan aparat keamanan. Mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial ke dalam wilayah yang menjadi fokus operasi pengamanan, sehingga hasil pendekatan *soft power* tidak berhenti pada tataran keamanan, tetapi berlanjut pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Instansi Sipil Terkait; Mendorong koordinasi lintas sektor yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dalam mendukung pendekatan *Smart Power*, khususnya dalam bidang pendidikan kebangsaan, penguatan ideologi Pancasila, dan moderasi beragama. Mengembangkan mekanisme komunikasi strategis terpadu, guna menangkal narasi negatif, disinformasi, dan propaganda yang dapat memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan dan negara.
6. Kepada Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat Papua; Meningkatkan peran aktif sebagai mitra strategis aparat keamanan, khususnya dalam membangun dialog, rekonsiliasi sosial, dan penyampaian nilai-nilai kebangsaan yang selaras dengan budaya lokal. Menguatkan narasi perdamaian, persatuan, dan keadilan sosial dalam setiap kegiatan adat dan keagamaan, sebagai bagian dari upaya menurunkan resistensi dan memperkuat stabilitas keamanan berbasis masyarakat.
7. Kepada Peneliti Selanjutnya; Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi *Smart Power* secara kuantitatif, misalnya dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat, efektivitas komunikasi sosial, dan dampak pendekatan non-

militer terhadap stabilitas keamanan. Peneliti berikutnya diharapkan mengembangkan model operasional *Smart Power* yang aplikatif, yang dapat dijadikan pedoman bagi TNI dalam operasi pengamanan wilayah rawan konflik lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung T. (2022). Upaya Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 16, Nomor 2.
- Agus Wijananto. (2024). "Panglima TNI Siapkan Strategi Atasi Konflik di Papua", Retrieved from <https://rri.co.id/nasional/573336/panglima-tni-siapkan-strategi-atasi-konflik-di-papua> tanggal 12 Juli 2025
- Antara. (2023). "Panglima TNI canangkan pendekatan "Smart Power" di Tanah Papua". Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/3835248/panglima-tni-canangkan-pendekatan-smart-power-di-tanah-papua> diakses pada 12 Juli 2025
- Campbell, C. (2016). Human Rights and Political Advocacy in West Papua. Sydney: TEDxSydney.
- DetikNews. (2024). "Jenderal Agus Subiyanto Bakal Gunakan 'Smart Power' Tangani Konflik Papua", Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-7033985/jenderal-agus-subiyanto-bakal-gunakan-smart-power-tangani-konflik-papua> tanggal 12 Juli 2025
- Fransisco, dkk. (2023). "Strategi TNI dalam Menanggulangi Gerakan Separatis Papua Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Kesejahteraan Papua."
- Katz, R. S. (2017). *Smart Power* and Counterterrorism in Southeast Asia. Journal of Terrorism Research.
- Kurniawan, D. et al. (2024). Ketimpangan Pembangunan di Papua dan Strategi Pemerintah. Jurnal Ketahanan Nasional, 30(2), 102–119.
- Lemoine, J. (2015). Countering Extremism with *Smart Power*: The Indonesian Experience. Journal of Asian Security.
- Leung, K. (2016). *Smart Power* Strategies in Conflict Zones: Lessons from Papua. Conflict and Peace Studies.
- Li, X. (2018). The Balance of *Smart Power* in Southeast Asia: Indonesia's Strategy. Journal of Southeast Asian Affairs.
- Lutz, C. (2017). *Smart Power* and Human Security: A Study of Indonesia's Approach. Journal of Human Security.
- Mahmud, M. (2019). Papua's Independence Movement: The Role of *Smart Power* in National Security. Journal of Southeast Asian Studies.
- Martin, A. (2016). The Strategic Use of *Smart Power* in Indonesia's National Security Policy. Journal of Strategic Policy.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Ridha Iswardhana & Puguh Toko Arisanto (2022). "Implementasi *Smart Power* dan Linkage Issues Indonesia dalam Perlindungan Kedaulatan Maritim di Kepulauan Natuna".
- Mulyani, S. (2018). *Soft power* vs. *Smart Power*: Indonesia's Approach to Regional Stability. Journal of International Relations.
- Nye, J. (2009). The Future of Power. Public Affairs.
- Ones Yikwa. (2024). "Pendekatan *Smart Power* Tangani Konflik Papua Sangat Tepat". Retrieved from <https://mediadayak.id/pendekatan-smart-power-tangani-konflik-papua-sangat-tepat/?print=print>, diakses pada 12 Juli 2025
- Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 mengenai Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- Putra Yudha Wijaya Mukti, dkk. (2024). "Implementasi Program Pertahanan dalam Mendorong Percepatan Pembangunan di Wilayah Provinsi Papua."



- Rasid Priesdiantoro, dkk. (2024). "Analysis of the Implementation of Government Policy Through the Transcend Strategy of the Indonesian National Army in Efforts to Resolution the Papua Conflict."
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*: Bandung: Refika Aditama
- Tedjo, E. (2005). *Strategi Pertahanan Negara: Perspektif Sistem Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
- Teguh Wiratama, dkk. (2024). "Strategi *Smart Power* dalam Menghadapi Ancaman Gerakan Organisasi Papua Merdeka Guna Mendukung Keamanan Nasional."
- Udayanto, W.S. (2024). Strategi Intelijen Militer Dalam Merespon Ancaman di Papua. *Santhet*, 7(1).
- Yani, D. (2017). The Role of *Smart Power* in National Security Strategies: The Case of Papua. *Journal of International Affairs*.
- Yulia, R. (2019). Integrating *Smart Power* in National Security: Lessons from Papua. *Indonesian Journal of Defense Studies*.
- Yunita, S. (2018). *Smart Power* and Regional Stability: Indonesia's Approach to Papua. *Journal of Southeast Asian Studies*.